

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Feminisme

Tidak ada definisi secara pasti mengenai feminisme, ini karena pengertian dan lingkup feminisme itu sendiri. Namun secara sederhana, pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme diartikan sebagai “gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria”. Definisi tersebut masih sangat luas, sebab pengkajian tentang feminisme slalu bergerak sesuai kondisi sosio-kultural masyarakat. Di Indonesia, kata feminisme masih terbilang baru. Dalam istilah lazim, masyarakat memaknai feminisme sebagai apa yang disebut emansipasi.¹

Para pakar feminisme yakin bahwa feminisme bukan suatu konsep yang terpaku pada satu pernyataan saja. Pemberian makna feminisme akan terus berkembang sesuai dengan topik yang diperjuangkan oleh kaum perempuan. Konsep kesetaraan dan persamaan hak tidak dapat dikatakan hanya meliputi kehidupan sehari-hari saja. Seperti halnya yang diungkapkan Rosemarie Tong bahwa feminisme bergerak di semua bidang, karenanya tidak bisa pengertian feminisme dikotak-kotakkan dalam makna sempit.

Feminisme adalah kontruksi yang terus berkembang. Karena itu, banyak ilmuwan feminisme yakin bahwa yang terpenting dalam memahami feminisme adalah penghargaan dan penghormatan terhadap apa bentuk feminisme dan bagaimana mereka melaksanakannya. Pemahaman ini muncul dalam feminisme gelombang ketiga, ketika pergerakan perempuan bukan lagi menuntut hak dalam rumah tangga atau pekerjaan yang sama lagi dengan laki-laki. Tapi lebih beragam dan kompleks.² Akar dari feminisme adalah adanya ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Para pakar setuju bahwa telah terjadi pembedaan

¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

² Sarah Delaney McDougall, “Defining Feminism: A Phenomenological Exploration of the Meaning Women Assign to Their Feminist Identities,” *Graduate Study in Criminology and Criminal Justice* (North Dakota State University, 2012), <https://doi.org/10.4324/9781315721606-101>.

antara jenis kelamin dan relasi antar jenis kelamin. Ketertinggalan perempuan bukan sebab dari faktor biologisnya, namun karena relasi jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat.³

Gerakan feminisme secara umum dibagi ke dalam tiga gelombang periode. Gelombang pertama feminisme dimulai pada abad ke-18 hingga awal abad 19 dengan terselenggaranya konvensi pertama yang membicarakan tentang kesetaraan hak bagi perempuan. Tepatnya adalah Elizabeth Cady Stanton sebagai seorang aktivis yang merancang teks deklarasi Seneca Falls tentang kesetaraan kaum perempuan dalam konvensi Seneca Falls pada 1848. Deklarasi yang dikenal sebagai *declaration of sentiment* ini membahas mengenai tuntutan hak sosial, sipil, dan keagamaan perempuan. Dalam pidatonya, Elizabeth Cady Stanton mengawali dengan mengatakan perempuan memiliki hak untuk memimpin selayaknya laki-laki. Stanton juga mendeklarasikan kebebasan perempuan seperti kebebasan laki-laki dan mengkritik hukum yang memberikan kewenangan bagi laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang pada istrinya.⁴

Di masa Stanton perempuan masih berada di sektor domestik dan tidak memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Karena itu Stanton mengumpulkan rekan-rekan perempuannya untuk merundingkan pentingnya persamaan hak. Stanton berhasil menggarisbawahi kultur patriarki di masanya dengan membuat draf deklarasi Seneca Falls ini. Dalam drafnya, Stanton mengungkapkan bahwa laki-laki telah dianggap *superior* secara intelektualitas, moralitas, dan fisik. Deklarasi ini adalah yang pertama membahas hak perempuan. Pergerakan yang dibangun oleh Stanton menjadi awal dari gelombang pertama feminisme. Pembicaraan feminisme pada gelombang pertama dipengaruhi oleh kondisi berkembangnya industrialisasi serta paham politik sosialis dan liberalis.

Gelombang kedua feminisme dimulai pada 1960 an dan berlanjut hingga tahun 90-an. Gelombang ini bergerak dalam konteks anti perang dan penguatan hak-hak sipil perempuan. Masalah dominan yang dibicarakan adalah seksualitas dan hak

³ Denise Thompson, *Radical Feminism Today* (London: SAGE publications, 2001), hlm.6.

⁴ history.com, "Seneca Falls Convention," HISTORY, 2021, <https://www.history.com/topics/womens-rights/seneca-falls-convention>.

reproduksi perempuan.⁵ Ini dikarenakan pasca perang dunia, banyak propaganda yang menginginkan perempuan kembali ke ranah domestik. Sebab pada masa perang dunia, banyak pemuda dan suami yang dikirim ke medan perang menyebabkan kekosongan sektor publik dan ekonomi di negara. Sehingga kemudian perempuan mengisi kekosongan tersebut. Namun setelah perang diakhiri ditandai dengan kekalahan Jerman dan Jepang, dimulailah propaganda domestifikasi perempuan.⁶ Fokus gelombang kedua juga diarahkan untuk meloloskan amandemen persamaan hak dalam konstitusi yang akan menjamin kesetaraan sosial tanpa perbedaan jenis kelamin.

Pergerakan feminisme ini, dalam dunia barat, para aktivisnya telah melebarkan kajian feminisme tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Terutama meminta pengakuan atas otonomi, pemikiran rasional, kekuatan fisik, dan keadilan yang selama ini melekat sebagai konsep maskulinitas. Para feminis bergerak semakin radikal dan berani.

Gelombang feminisme ketiga dimulai pada 1990-an. Pengertian mengenai feminisme diturunkan dari gelombang sebelumnya namun memiliki pemahaman yang beragam. Perjuangan mengenai hak persamaan, hak publik, dan hak setara masih diperjuangkan. Dengan pengembangan sebab pada gelombang ini dunia telah dipertemukan melalui jejaring sosial dan perdamaian tanpa perang sehingga membuka peluang untuk bertemunya banyak paham. Feminisme jadi tidak terpancang ke dalam makna tunggal, melainkan menerima serta mendukung perbedaan dan perubahan. Sehingga dalam gelombang ini, pengertian feminisme sudah tidak bisa lagi diidentifikasi secara gamblang.⁷

Selesainya perang dunia, perkembangan teknologi, hingga kesadaran bersama membuat pemahaman bahwa perempuan dan feminisme berasal dari banyak ras, etnik, kewarganegaraan, agama, dan latar belakang budaya. Karena itu para feminis mengakui bahwa sangat sulit untuk mengetahui perbedaan kebutuhan perempuan.

⁵ Martha Rampton, "Four Waves of Feminism," *Pacific Magazine* (Oregon, 2008), <https://www.pacificu.edu/about/media/four-waves-feminism>.

⁶ Melati, *Membicarakan Feminisme*.

⁷ Rosemarie Tong, *Feminist Thought* (Colorado: Westview Press, 2009).

Gender menjadi isu utama dalam pergerakan feminisme. Secara kebahasaan, gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut World Health Organization (WHO), gender merujuk pada karakteristik yang disematkan kepada laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari konstruksi sosial. Termasuk didalamnya adalah norma, perilaku, dan peran yang diidentikkan pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah sistem hirarki dan umumnya menyebabkan ketidaksetaraan atau ketimpangan pada bidang sosial dan ekonomi secara menyeluruh.⁸

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran yang muncul paling awal. Kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari liberalisme itu sendiri. Paham liberalisme telah berkembang sejak terjadinya revolusi Prancis dimana terjadi pengakuan hak-hak warga negara namun masih ada ketimpangan yang melingkari kehidupan perempuan. Perkembangan aliran liberal ini pertama-tama berkembang di Eropa. Dapat ditelusuri dalam buku karya Olympia de Gouges yang berjudul *Declaration of the Rights of Women and Female Citizen* pada 1791. Buku ini digadang-gadang menjadi permulaan pemikiran perempuan sebagai warga negara yang setara. Gerakan pemikiran hak perempuan untuk setara terus berlanjut. Dengan dituliskannya esai yang memuat tentang keharusan hak milik perempuan untuk dipenuhi yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft. Berlanjut pada tulisan Harriet Taylor dan John Stuart Mill. Sedangkan pergerakan feminisme yang dianggap liberal muncul pertama kali di America pada 1848 dengan diadakannya konferensi Seneca Falls.⁹

Pada masa revolusi Prancis atau masa-masa kebangkitan, hak-hak individu diakui secara luas dan akhirnya inilah yang dinamakan liberal, kebebasan pada masing-masing individu. Namun demikian kebebasan ini masih condong ke arah laki-laki. Kebebasan seutuhnya diberikan kepada laki-laki, namun perempuan masih terjebak dalam ranah domestik. Argumentasi feminisme liberal adalah bahwa setiap individu sebagai manusia memiliki rasionalitas serta memiliki hak

⁸ WHO, "Gender and Health," who.int, n.d., https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.

⁹ Melati, *Membicarakan Feminisme*.

asasi untuk bebas. Feminisme liberal menyangkut pada hak-hak perempuan yang berkenaan dengan peraturan, kebijakan, dan pendidikan, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Feminisme liberal menganggap bahwa budaya patriarki telah mereduksi persoalan pribadi perempuan dan hak berpolitikanya.¹⁰

Feminis liberal pada abad ke-18, 19, dan awal abad ke-20 menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan berhak berpartisipasi dalam kehidupan publik, paling tidak melalui hak pilih, institusi pernikahan dan undang-undang yang mengaturnya, serta akses pendidikan yang sama dengan laki-laki dan kesempatan bekerja.¹¹

Alison Jaggar dalam *Feminis Politics and Human Nature* mengungkapkan akar dari gagasan feminisme liberal tidak lain dari pemikiran liberal itu sendiri, yang artinya menilai pribadi manusia memiliki nilai yang unik dan kapasitas rasional sehingga membedakannya dengan hewan. Kebebasan setiap individu dipandang menjadi sesuatu yang krusial sehingga masyarakat akan dipandang adil bila masing-masing individu dapat menjalankan otonomi dan memenuhi diri mereka sendiri. Berbeda dari sosialis yang berdasarkan pada kesejahteraan bersama, liberalis lebih merujuk pada memaksimalkan hak untuk masing-masing individu sebagai hal dasar yang harus dipenuhi.¹²

Secara sederhana, meskipun dijumpai dalam banyak bentuk dan tujuan, feminis liberal menitikberatkan tuntutan pada kesetaraan atau juga disebut sebagai keadilan gender (*gender equity*). Feminisme liberal ingin membebaskan perempuan dari peran gender yang menindas, seperti memperjuangkan tentang keadilan, hak atas pendidikan, akses kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Perempuan menjadi kelas yang dirugikan dalam bidang pekerjaan. Norma-norma yang berlaku di budaya patriarki membatasi pekerjaan perempuan dalam ranah ‘feminim’,

¹⁰ Lucy Bailey, “Feminism, Liberal,” in *Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies* (West Sussex: John Wiley & Son, Ltd., 2016).

¹¹ B.A. Ackerly, “Feminism Theory: Liberal,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2001), <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/liberal-feminist>.

¹² Tong, *Feminist Thought*, hlm.11.

misalnya pekerja domestik. Bahkan patriarki telah disinyalir menjadi penyebab dari adanya kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Lapangan pekerjaan pun lebih mencari laki-laki dengan alasan dapat bekerja lebih profesional dan tidak terganggu oleh tanggung jawab keluarga. Karena itu feminisme liberal hadir sebagai bentuk perempuan untuk mendapat keadilan di setiap sektor kehidupan.

Rosemarie Tong mengungkapkan perbedaan mendasar antara feminisme liberal klasik dan kontemporer ada dalam fokus dan tindak lanjut. Feminisme liberal klasik terbatas pada usaha pemerintahan seperti pengelolaan politik yang ramah perempuan dan kebebasan umum lainnya. Tentang kebijakan afirmatif, feminis liberal klasik memandang bahwa setelah kebijakan afirmatif diundangkan dan peraturan diskriminatif dicabut maka perempuan telah mendapat hak kesetaraannya, meskipun itu tanpa usaha mengontrol tempat yang didominasi laki-laki. Sedangkan feminisme liberal kontemporer yang disebut pula sebagai feminisme liberal kesejahteraan (*welfare liberal feminists*) memandang bahwa pemerintah harus memenuhi kebutuhan warga negaranya, seperti layanan kesehatan, edukasi, dan keamanan sosial. Terkait kebijakan afirmatif, feminis liberal kesejahteraan menuntut keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk mendorong agar tempat yang awalnya mayoritas di tangan laki-laki dapat dialokasikan secara setara ke tangan perempuan.¹³

2. **Feminisme Marxis dan Feminisme Sosialis**

Feminisme marxis melihat bahwa ketidakadilan yang terjadi pada perempuan adalah karena adanya kelas sosial sebagai akibat dari kapitalisme. Feminisme marxis berpandangan bahwa terjadinya ketimpangan adalah akibat dari struktur sosial di masyarakat yang membedakan manusia. Feminisme Marxis mengkritik domestifikasi terhadap perempuan akibat dari adanya kapitalisme yang menguntungkan laki-laki karena dipandang lebih produktif. Domestifikasi dan ketertinggalan perempuan bukan dianggap

¹³ Tong, hlm.34.

sebagai sesuatu yang disengaja oleh individu, melainkan karena struktur kelas sosial, politik, dan ekonomi.¹⁴

Secara historis, disadarinya perempuan menjadi korban penindasan akibat kelas dapat ditelusuri melalui tulisan Friedrich Engels yang berjudul *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884) mengelaborasi hubungan sosial dari produksi dan reproduksi. Engels' menyebut bahwa telah terjadi subordinasi perempuan di ranah keluarga dimana kedudukannya menjadi *head maid* atau pelayan utama. Subordinasi dipandang bukan sebagai segi natural biologis, melainkan sebagai hubungan kelas kapitalisme yang memaksa adanya hierarki gender sebagai penindasan perempuan. Feminisme marxis berpandangan bahwa keluarga patriarki adalah bagian tak terpisahkan dari kapitalisme dan karenanya itu harus dihancurkan.¹⁵

Adanya *second sex* adalah buah dari pemikiran feminisme marxis. Dalam perkembangan kontemporer, penindasan pada perempuan dimulai dari pekerjaan rumah yang dibebankan pada perempuan hanya karena mereka adalah *second sex* yang ada untuk melayani *first sex* (laki-laki). Pada perkembangan kontemporenya, feminisme marxis menjadi feminisme sosialis.¹⁶

Feminisme sosialis menyandarkan pandangannya bukan hanya tentang kritik kapitalisme, tapi juga pada budaya patriarki. Mereka melihat bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor produksi justru membuat perempuan berperan sebagai 'budak'. Partisipasi perempuan dalam dunia produksi memang dipandang perlu namun hal itu tidak menaikkan status perempuan. Pandangan sosialisme berkembang pada 1970-an. Dwi Susanto mengungkap feminisme sosialis berpandangan bahwa sosialisme hanya bisa terwujud bila ada pembebasan perempuan. Dengan demikian, pembebasan perempuan menjadi hal yang krusial. Feminis sosialis hadir untuk mengkritik dan berjuang menghapus sistem

¹⁴ Dwi Susanto, "Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsin" (STAIN Kediri, 2013), hlm.55.

¹⁵ Elisabeth Armstrong, "Marxism and Socialist Feminism," in *Study of Women and Gender* (Northampton: Faculty Publications, Smith College, 2020).

¹⁶ Tong, *Feminist Thought*, hlm.111.

kepemilikan. Dimana nantinya harta istri tidak lagi dianggap sebagai kepemilikan pribadi milik suami. Seperti halnya harapan Marx untuk menghapuskan kelas dalam masyarakat, mewujudkan masyarakat tanpa perbedaan gender.¹⁷

3. Feminisme Radikal

Konsep utama dari hadirnya feminisme radikal adalah perlawanan terhadap laki-laki di tengah agenda politik feminis. Lebih jauh lagi adalah pada masyarakat yang telah dianggap berorientasi pada laki-laki (*men supremacy*).¹⁸ Feminisme radikal berusaha menantang prinsip utama dari feminisme liberal yaitu membebaskan perempuan melalui reformasi institusi sosial. Menurut feminis radikal, institusi sosial layaknya keluarga, pernikahan, dan organisasi kerja adalah institusi yang melanggengkan supremasi laki-laki. Karena itu feminisme radikal bukan mereformasi institusi, tapi merevolusinya dengan alasan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan dengan menciptakan kesadaran dan perlawanan terhadap institusi sosial dan konsep yang mendukung supremasi laki-laki.¹⁹ Paham feminisme ini mempromosikan kemandirian perempuan tanpa laki-laki dan menganggap bahwa relasi seksual dalam masyarakat selama ini ada dengan prinsip kekuasaan superior pada suami. Karena itu mereka menginginkan perubahan total dalam institusi sosial, seperti hubungan lesbian.²⁰

4. Feminisme Islam

Margot Badran (2010) mengungkapkan kehadiran feminisme Islam telah diwacanakan sejak 1990 dalam perundingan meja bundar tentang politik identitas dan perempuan (*Roundtable on Identity Politics and Women*) yang diorganisasikan oleh Valentine Moghadam di United Nations World Institute for Development Economics (WIDER) di Helsinki. Para ahli menerka bahwa sedang ada fenomena mengartikulasi prinsip keadilan gender dan

¹⁷ Dwi Susanto, “Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsin” (STAIN Kediri, 2013), hlm.56-57.

¹⁸ Thompson, *Radical Feminism Today*, hlm.20.

¹⁹ W.L. Lee, “Feminist Theory: Radical Lesbian,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2021), <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/liberal-feminist>.

²⁰ Susanto, “Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsin,” hlm.54.

keadilan sosial melalui tafsir bahasa Al-Quran yang untuk selanjutnya akan dikenal sebagai feminisme Islam. Perundingan meja bundar ini membahas topik yang relatif baru pada masa itu yaitu tentang relasi politik identitas Islam fundamental dengan kekangan yang dihadapi oleh perempuan.²¹

Badran termasuk dalam feminis sekuler yang pertama membicarakan feminisme Islam. Feminis sekuler dalam Islam muncul sebagai artikulasi dari isu pada awal abad ke-20 tentang Islam modernis, nasionalis sekuler, dan humanisme. Segi Islam modernis yang disuarakan oleh feminis sekuler adalah membawa hak-hak yang diberikan Al-Quran kepada perempuan, dengan demikian menghapuskan kekangan dari masyarakat patriarki yang berdalih Islam. Pada masa ini, feminis Islam sekuler mempromosikan hak-hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Frasa feminisme Islam mulai mapan didengungkan pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2002 saat Asma Barlas menerbitkan *Believing Women in Islam: Un-reading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* yang menunjukkan bagaimana tafsir patriarkal memengaruhi pemahaman tentang Al-Quran yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan bagi semua umat. Kemudian pada 2006 Amina Wadud memublikasikan *Gender Jihad: Women's Reform in Islam* yang memproyeksikan makna jihad gender dalam interpretasi maknanya terhadap gender dan perempuan dalam Islam. Jihad Gender ini akhirnya diartikan banyak orang sebagai feminisme Islam. Frasa ini kemudian tersebar luas melalui media daring.²²

Feminisme Islam menurut Kynsilehto berakar dari gerakan untuk mempertanyakan budaya patriarkal dalam tradisi tafsir Al-Quran dan Hadis. Para feminis menuntut adanya penerjemahan ulang mengenai tafsir yang misoginis, karena pada dasarnya Al-Quran dan Hadis menjelaskan tentang kesetaraan dan keadilan bagi umat manusia.

²¹ Margot Badran, "An Historical Overview of Conferences on Islamic Feminism: Circulations and New Challenges," Remmm, 2010, <https://journals.openedition.org/remmm/6824>.

²² Margot Badran, "Engaging Islamic Feminism," in *Islamic Feminism: Current Perspectives* (Tampere: TAJU, 2008), hlm.31.

Feminisme Islam terfokus pada proses untuk mempromosikan prinsip-prinsip feminisme dalam Islam dan menentang tradisi patriarki.²³

Sedangkan menurut Anwar, feminisme Islam sebagai gerakan sosial dan intelektual oleh perempuan muslim yang mendakwahkan agama Islam dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender dan menghapuskan penindasan.²⁴ Perlu menjadi perhatian Anwar merujuk pada kondisi feminisme di Indonesia pada masa 1900 hingga akhir 1998 atau sebelum reformasi.

Munculnya feminisme Islam tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak. Sebaliknya, seperti diungkapkan oleh Etin Anwar dalam bukunya *Feminisme Islam* mengungkapkan pertemuan antara Islam dan feminisme sering memicu perdebatan dan diskusi. Kedua eksistensi tersebut saling bertubrukan termasuk salah satunya karena pemahaman bahwa feminisme adalah produk Barat dan tidak relevan dengan Islam. Penolakan seperti ini lebih kental dalam masyarakat yang tradisional dan memegang teguh konservatisme. Mereka beranggapan kedatangan feminisme sebagai produk budaya barat memiliki tujuan tidak lain untuk merusak tatanan budaya, agama, bahkan negara. Dengan anggapan tersebut mereka menolak feminisme sebagai kerangka analitis untuk mengentaskan kesenjangan gender.

Penolakan kaum tradisionalis terhadap feminisme berkaitan dengan realitas sejarah. Fakta sejarah pada masa kolonialisme menempatkan Eropa atau Barat sebagai golongan yang memiliki derajat lebih tinggi daripada masyarakat yang negaranya dijajah. Karena demikian, akhirnya timbul 'kegemaran' kaum Eropa untuk membuat peraturan sesuai pemahaman mereka. Sebagai contoh adalah penggunaan jilbab pada muslim dianggapnya sebagai upaya represif yang mengekang kaum perempuan sehingga dibuat hukum untuk melarang penggunaan jilbab. Pengalaman yang demikian, secara nyata mempengaruhi persepsi masyarakat tentang feminisme. Pengalaman terjajah sendiri menjadi

²³ Anitta Kynsilehto, "Islamic Feminism: Current Perspectives," in *ISLAMIC FEMINISM: CURRENT PERSPECTIVES* (Tampere: TAJU, 2008).

²⁴ Etin Anwar, *Feminisme Islam* (Bandung: mizan, 2021), hlm.20.

ingatan mengerikan bagi masyarakat hingga akhirnya membenci segala produk barat.²⁵

Meski dengan berbagai penolakan, pada hakikatnya Islam dan feminisme didasarkan pada segi historisnya memiliki kerangka dalam usaha mengangkat derajat kaum perempuan dan mengenai kesetaraan. *Pertama*, Islam menjadi stimulan yang memacu perubahan progresif tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki serta penghapusan penindasan kepada perempuan. *Kedua*, kaum muslim mulai mampu menyesuaikan diri dan menjawab tantangan mengenai kondisi sosial politik sehubungan dengan kolonialisme, agenda reformasi Islam, dan aktivisme perempuan sekuler. *Ketiga*, keterlibatan perempuan muslim melalui organisasi telah meningkatkan peran publiknya sehingga mampu meningkatkan derajat perempuan muslim.²⁶ Kepaduan antara Islam dan feminisme menciptakan penafsiran baru Islam secara kontekstual yang menghimpun pengalaman perempuan. Anwar menganggap bahwa pola hubungan Islam dan feminisme adalah saling ketergantungan dan saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan kemajuan perempuan.

Prinsip yang sering dijunjung dalam semangat Islam dan feminisme adalah *Islam rahmatan lil alamin* (Islam rahmat bagi semesta) yang memberi ruang bagi segenap muslim untuk menginterpretasikan ajaran agama sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman selagi bernilai kebaikan. Prinsip itu sebagai jembatan kemajuan mengantarkan usaha penerjemahan Islam yang merangkul perempuan dan mengkritik tafsir maskulin.²⁷ Anwar mengungkapkan beberapa ciri feminis, yaitu:

1. Memihak pada perempuan, sensitif terhadap isu perempuan, serta bersikap pluralis pada perbedaan.
2. Mengakui perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memiliki komitmen diri mengubah norma budaya yang berakibat buruk bagi hubungan laki-laki dan perempuan.

²⁵ Etin Anwar, *Feminisme Islam* (Bandung: mizan, 2021), hlm.7.

²⁶ Anwar, hlm.14.

²⁷ Anwar, hlm.18-19.

3. Menggunakan perspektif gender dalam memahami isu perempuan di samping tetap memerhatikan budaya dan agama di lingkungan sosial lokal untuk memahami kondisi perempuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Anwar, Feminisme Islam di Indonesia tersebar secara melokal menggunakan kearifan Indonesia. Proses tersebarnya feminisme Islam di Indonesia ini oleh Anwar diungkap sebagai pribumisasi feminisme.²⁸ Keilmuan feminisme Islam menurut Musdah Mulia seperti diungkapkan oleh Anwar memiliki tiga karakteristik. Pertama, adanya transisi dari budaya patriarki menuju egalitarianisme gender. Kedua, mereformasi hukum untuk menyudahi diskriminasi dan penindasan pada perempuan. Ketiga, menginterpretasi ulang teks agama menjadi lebih manusiawi dan ramah perempuan.²⁹

Pergerakan feminisme Islam menurut Badran sudah seharusnya masuk dalam politik. Argumentasi yang dibangun oleh Badran, feminisme Islam kini harus beralih dari gerakan teologi menjadi gerakan politik. Kepentingan-kepentingan perempuan muslim tidak lagi dapat ditampung hanya melalui pergerakan teologis. Untuk memperjuangkan keadilan gender maka feminis baik itu di negara sekularis atau negara muslim memasukkan agenda politik sebagai gerakannya.³⁰

Badran mengungkapkan gerakan feminisme sebagai gerakan yang mengelaborasi kepentingan perempuan untuk mendapat hak, kesetaraan gender, dan kebebasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari adanya hak asasi manusia. Keberadaan feminisme Islam diartikan bahwa Islam mengonstruksikan nilai-nilai budaya yang berkesetaraan dalam seluruh umatnya dan pada saat itu berkembang di Timur. Dengan demikian, Badran beranggapan bahwa perkembangan feminisme tidak diciptakan berdasarkan label ras atau dianggap konsep Barat. Adanya pengakuan kesetaraan pada Al-Quran menunjukkan bahwa Islam telah

²⁸ Anwar, hlm.177-178.

²⁹ Anwar, hlm.253.

³⁰ Badran, "An Historical Overview of Conferences on Islamic Feminism: Circulations and New Challenges."

mengenal gerakan feminisme dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan.³¹

B. Islam dan Feminisme

Feminisme jika mengacu pada ruhnya, yaitu menciptakan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, maka Islam telah menjadi dasar bagi bersikap. Tauhid atau ajaran untuk mengesakan hanya Allah SWT dan beribadah kepada-Nya sepenuh hati mengisyaratkan nilai kesetaraan antara manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mulia menyebut tauhid sebagai inti dari keIslaman bukan hanya membebaskan manusia dari perilaku tercela dan tindakan menyembah selain Allah SWT, melainkan juga menghapus segala perilaku diskriminatif dan penindasan kepada kaum lemah (*mustadh'afin*) termasuk didalamnya adalah perempuan. Dari segi teologi Islam, semua makhluk diciptakan oleh Allah untuk sama dan setara.³²

Tauhid dikatakan oleh Mulia adalah nilai-nilai universal Islam. Di dalamnya terkandung nilai hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) sebagai kondisi sosial yang terbangun atas prinsip persamaan. Adanya persamaan hak ini dalam Islam berarti telah mengakui dan mengakomodasi feminisme, yaitu pengakuan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak asasinya, termasuk hak pendidikan, hak waris, dan hak politik.

Prinsip kedua yang timbul dari ajaran universalisme Islam adalah relasi manusia yang merdeka dan bebas. Relasi ini adalah saling mengakui dan saling menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Dengan demikian maka Islam menghapuskan segala bentuk penindasan dan perebutan kebebasan atas seseorang. Prinsip ini juga berkenaan dengan pemberian otonomi menyeluruh kepada setiap manusia laki-laki ataupun perempuan untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Angapan perempuan hanya di ruang domestik dibantah karena setiap manusia memiliki kebebasan mengembangkan kompetensi diri sebagai konsekuensi dari prinsip ini.

³¹ Badran, "Engaging Islamic Feminism," hlm.27.

³² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm.28.

Relasi ini akan bermuara pada persaudaraan yang menguatkan persatuan. Hubungan baik antar individu dan persaudaraan erat hanya bisa terjadi dengan keadilan serta dapat dipertahankan dengan keadilan pula. Dengan demikian maka relasi yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat dan negara harus tercipta secara adil.³³

Islam secara nyata menempatkan kaum laki-laki dan perempuan secara sejajar. Maka dapat diartikan bahwa Islam mendukung adanya pemikiran dan gerakan feminisme sebagai aktivisme hak-hak perempuan untuk setara sesuai dengan tauhid. Mulia menuturkan kesejajaran posisi laki-laki dan perempuan ke dalam tiga hal pokok, yaitu: 1) hak khusus yang diberikan Islam kepada perempuan yang pada masa pra Islam belum diakomodasi. Seperti hak hidup bagi bayi perempuan. 2) Baik laki-laki ataupun perempuan memanen ibadah yang mereka tuai tanpa membedakan. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak sama atas pahala yang sama. Serta mendapat dosa yang sama pula. 3) Islam mengutuk adanya penindasan dan perlakuan tidak adil bagi insan, baik laki-laki ataupun perempuan.³⁴

Mulia menekankan pentingnya reinterpetasi naskah keagamaan dalam usaha feminisme Islam. Ini didasari dari anggapan bahwa manusia yang menerjemahkan dan memahami Al-Quran memiliki perbedaan dalam persepsi. Kemungkinan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya di tempat penafsir berada. Mulia mengungkap dua alasan pentingnya reinterpretasi naskah agama. *Pertama*, runtuk menyesuaikan pola-pola sosiokultural baru dan perubahan situasi. *Kedua*, pentingnya memahami agama secara kontekstual dan demokratis.³⁵

C. Feminisme di Indonesia

1. Feminisme Pra Kemerdekaan

Feminisme di Indonesia bila merujuk pada pengertian pergerakan perempuan maka bisa dilacak melalui pergerakan kaum perempuan di masa penjajahan. Para perempuan di abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ikut mengangkat senjata untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan masyarakat, bukan

³³ Mulia, hlm.47-50.

³⁴ Mulia, hlm.56.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), hlm.631.

hanya kaum perempuan. Beberapa tokohnya adalah Cut Nyak Dien (1850-1908) yang ikut serta dalam perang Aceh pada 1873-1908 bersama Teuku Cik Ibrahim Lamnga dan suaminya Teuku Umar. Cut Nyak Dien sewaktu masih menjadi istri berperan menjadi penasehat dan penyumbang. Setelah dua kali kehilangan suami, Cut Nyak Dien bertekad melanjutkan perjuangan rakyat Aceh dan membuat pasukan untuk perang gerilya melewati hutan³⁶.

Feminisme di masa pra kemerdekaan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu para pejuang yang mengangkat senjata, para pejuang pemikiran, dan gerakan organisasional. Salah satu pejuang perempuan yang mengangkat senjata telah diberi gambaran di paragraf sebelumnya. Jika membicarakan pejuang pemikiran, maka tokoh feminis tersebut contohnya adalah RA Kartini dan Rohanna Kudus. RA Kartini merupakan pejuang feminis yang banyak bergerak di pemikirannya melalui surat-suratnya dengan teman di Belanda.³⁷ Dalam masa pingitan, tepatnya dari tahun 1891, Kartini banyak berkirim surat dengan sahabatnya di Eropa, salah satunya adalah Stella (Estelle Zeehandelaar) yang juga seorang militan pergerakan feminis sosialis di Belanda.³⁸

Surat yang ditulis Kartini berisikan kritikan dan harapannya terhadap budaya di Jawa. Kartini mengulas keadaan perempuan Jawa yang penuh kungkungan dan tidak memiliki kebebasan. Beliau dalam satu surat menyebut pingitan yang dialaminya telah membuat semangat belajar redup. Begitupun dengan perempuan Jawa pada masa itu yang harus rela mengorbankan masa remajanya untuk menjalani pingitan.³⁹

Surat-surat itu menampakkan pemikiran feminisme RA Kartini yang menghendaki adanya keadilan bagi perempuan. Kartini secara umum dianggap sebagai tonggak pemikiran feminisme di Indonesia. Dalam pemikiran beliau, perempuan Indonesia hanya bisa maju jika memiliki pendidikan tinggi.

³⁶ Firdaus Wahid, “Kontribusi cut nyak dien dalam perang aceh (1873-1908),” *uinjkt.ac.id* (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40956>.

³⁷ Sudrajat, “Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya.”

³⁸ Roisatul Hikmah, “Gagasan dan Gerakan Feminisme Islam R.A. Kartini (1891-1904)” (UIN Sunan Ampel, 2016).

³⁹ Hikmah, hlm.42.

Melalui dukungan suaminya, Bupati Rembang Raden Adipati Joyoningrat, Kartini diberi kebebasan mendirikan sekolah perempuan di samping kompleks kantor Kabupaten Rembang.⁴⁰ Pemikiran feminisme RA Kartini dikumpulkan dan diterbitkan oleh Abendon dengan judul *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang).

Tokoh pejuang perempuan lain adalah Ruhana Kuddus di Minangkabau. Beliau adalah pelopor dari surat kabar Soenting Melajoe, yaitu surat kabar dengan fokus perempuan dan perjuangan pada 1911-1921. Ruhana Kuddus juga mendirikan perkumpulan Kerajinan Amai Setia (KAS) pada 11 Februari 1911 di Koto Gadang sebagai tempat pemberdayaan perempuan melalui baca, tulis, berhitung, belajar agama, akhlak, dan membuat kerajinan tangan. Feminisme Ruhana Kuddus tampak dari pergerakannya dalam membangun pendidikan bagi perempuan Minangkabau. Menurutnya, pendidikan adalah sarana untuk menaikkan derajat perempuan. Perjuangan Ruhana Kuddus lainnya adalah pendirian *Ruhana School* di Bukittinggi pada 1916 sebagai perlawanan terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan kehadiran KAS. *Ruhana school* mengajari muridnya untuk membaca, menulis, dan membordir menggunakan mesin modern. Pelatihan keterampilan terus dilakukan Ruhana Kudus karena dengan begitu ekonomi perempuan Minangkabau bisa meningkat.⁴¹

Pada awal abad ke-20, seiring dengan terbentuknya organisasi masyarakat untuk menggalang persatuan, organisasi perempuan turut berkembang. Salah satu peristiwa penting dalam feminisme di Indonesia adalah kongres perempuan 1 yang digelar di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Setidaknya 30 organisasi keperempuanan hadir mengikuti kongres. Diantaranya adalah Putri Indonesia, Putri Budi Sedjati, Wanita Katholik, Kesoemo Rini, Wanita Moeljo, Wanita Utomo, Aisyiyah, Roekoen Wanidijo, Budi

⁴⁰ Hikmah, hlm.41.

⁴¹ Nur Farida Deliani, Nazhiratul Khairat, dan Kori Lilie Muslim, "Gerakan Emansipasi Ruhana Kuddus Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Pendidikan Perempuan Di Minangkabau," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.1097>.

Rini, Putri Indonesia, Wanita Sedjati, Wanita Taman Siswa, dan lain sebagainya.⁴²

Terselenggaranya kongres perempuan pertama tidak lain untuk menyatukan cita-cita dari beragam organisasi keperempuanan. Kongres ini merupakan tempat mempersatukan golongan untuk menggalang kepentingan yang sama bagi masa depan perempuan Indonesia. berdasarkan hasil putusan, maka dibentuklah Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) sebagai federasi dari organisasi perempuan serta menerbitkan surat kabar yang diberi nama *Isteri*. Putusan lain adalah mendirikan *studiefonds* untuk anak perempuan kurang mampu, memperkuat pendidikan *padvindsterij* (kepanduan putri), dan mempropagandakan penolakan terhadap perkawinan anak. Secara terperinci bidang yang dibicarakan dalam kongres perempuan mengenai perempuan dalam perkawinan (kedudukan dalam perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak) dan pendidikan.⁴³

Perjuangan pergerakan perempuan meredup dalam masa kependudukan Jepang. Pada masa ini satu-satunya organisasi yang diizinkan adalah *Fujinkai* yang diisi oleh para istri pegawai negeri. Jabatan dan status keanggotannya ditentukan oleh jabatan suaminya di instansi. Secara umum kegiatan dalam *Fujinkai* adalah pemberantasan buta huruf.

2. Feminisme Pasca Kemerdekaan (Orde Baru)

Seiring kemerdekaan, organisasi perempuan berkembang kembali. Hingga tahun 1965, perempuan memiliki ruang gerak yang signifikan. Ini terlihat dari terbentuknya organisasi seperti Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) pada 1950 yang akhirnya berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perubahan nama diakibatkan banyaknya perempuan bergabung dan membawa isu yang lebih beragam. Fokus pada Gerwani adalah masalah

⁴² Isnan Hidayatur, "Peranan Kongres Perempuan Indonesia Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia" (Universitas Jember, 2015), <http://repository.inej.ac.id/handle/123456789/76082>, hlm.2.

⁴³ Trimurtini, "Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 Di Yogyakarta," hlm.60-63.

peningkatan kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan menguatkan hak itu.⁴⁴

Lambat laun, gerakan sosial yang dilakukan oleh Gerwani mengarah pada sosialisme. Pada masa orde baru, Gerwani ditumbangkan Soeharto dengan propaganda bahwa komunis itu jahat dan semua yang berhubungan dengan paham itu harus dibasmi. Dengan pembubaran Gerwani, pemerintahan Orde Baru menunjuk Kongres Wanita Indonesia menjadi organisasi yang memayungi semua organisasi keperempuanan. Pada dasarnya, perubahan ini menjadikan organisasi perempuan tunduk pada pemerintah dan menjadi perpanjangan tangan. Kowani menjadi kekangan tersendiri bagi pergerakan keadilan perempuan.⁴⁵ Organisasi ini menekankan domestifikasi perempuan sebagai pendamping suami.

Pada tahun 1972, pemerintah membentuk program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di semua wilayah pedesaan di Indonesia dengan jargonnya Panca Dharma Wanita.⁴⁶

- a) Wanita sebagai istri pendamping suami
- b) Wanita sebagai ibu rumah tangga
- c) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
- d) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
- e) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

Adanya program PKK menunjukkan penanaman pemahaman kepada masyarakat bahwa perempuan memang pendamping suami. Domestifikasi diperkuat melalui pembentukan Dharma Wanita pada 1974. Organisasi ini

⁴⁴ Jasmin Floretta V.D., "4 Fase Gerakan Perempuan di Indonesia dan Apa yang Bisa Kita Pelajari Darinya," *Magdalene*, 2020, <https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajari-darinya>.

⁴⁵ Fitri Lestari, "Menilik Kembali Peran Organisasi Perempuan di Masa Orde Baru," *jurnal perempuan*, 2016, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/menilik-kembali-peran-organisasi-perempuan-di-masa-orde-baru>.

⁴⁶ Ashilly Achidsti, *Gender Gus Dur* (Yogyakarta: gading publishing, 2021), hlm.1.

mengakomodir semua istri pegawai negeri. Keanggotannya didasarkan pada pangkat suami di instansi tempat bekerja.⁴⁷

Meskipun demikian, tonggak penting feminisme Indonesia pada masa orde baru ditandai dengan adanya ratifikasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pencapaian lain adalah pembentukan Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita pada 1978 yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁴⁸

3. Feminisme Masa Reformasi

Perjuangan kaum perempuan untuk membela keadilan berlanjut di masa reformasi. Ketika ada banyak bukti menunjukkan adanya kejahatan seksual massal dan sistemik saat demo melengserkan Soeharto, Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan menggelar audiensi dengan Presiden Habibie. Salah satu tokoh yang berperan pada waktu itu adalah Saparinah Sadli. Beliau memberikan usulan untuk membentuk Komisi Nasional yang bertugas menampung dan mengarahkan isu perempuan di Indonesia. Komisi tersebut oleh Habibie akan dinamai Komisi Nasional Perlindungan Wanita di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita dan ibu negara sebagai pengurusnya. Tawaran itu ditolak oleh aktivis. Hingga pada akhirnya diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang menunjukkan independensi dan keberpihakan badan terhadap kekerasan. Pengesahan badan ini ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.⁴⁹

Pergerakan pada masa reformasi diikuti oleh Abdurrahman Wahid dengan mengubah nomenklatur Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Abdurrahman Wahid menempatkan perspektif gender dan pembangunan melalui

⁴⁷ Achidsti, hlm.2.

⁴⁸ Melati, *Membicarakan Feminisme*, hlm.26.

⁴⁹ komnas perempuan, "Sejarah Komnas Perempuan," komnasperempuan.go.id, 2014, <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>.

penerbitan Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Melalui kebijakan ini keberadaan perempuan dalam sektor politik diakomodir.

Secara umum, periodisasi pergerakan feminisme di Indonesia seperti diungkapkan Melati, yaitu:⁵⁰

Tabel 2.1. Periodisasi Feminisme di Indonesia

Periode	Ideologi gender	Yang diperjuangkan
Proto feminisme/emansipasi (1920)	Perempuan mendukung kemerdekaan	Memerdekakan perempuan dengan memerdekakan Indonesia
Feminisme awal (1950)	Ibu bangsa	Hak sebagai warga negara
Feminisme lanjutan (1960)	Perempuan dalam pembangunan	Melawan beban ganda dan domestifikasi, demokrasi
Puncak gerakan feminisme (1990)	Gender dan pembangunan	Kapasitas perempuan di ruang politik, pengentasan kekerasan terhadap perempuan
Feminisme kontemporer	Perempuan dan neoliberalisme	Melawan diskriminasi kelompok minoritas, masyarakat adat, dan lingkungan hidup

⁵⁰ Melati, *Membicarakan Feminisme*, hlm.35.

D. Feminisme dalam Politik

Feminisme adalah pergerakan kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Perjuangan feminisme di awal munculnya perjuangan seperti pada deklarasi Seneca Falls termasuk ke dalam feminisme politik yang menginginkan hak-hak sipil dan publik bagi perempuan. Beralih ke dalam gelombang kedua feminisme, perjuangan feminisme politik mengikut arus pemikiran marxis yang berpusat pada tenaga kerja dan konsepsi identitas. Feminisme politik berkembang menjadi gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan membawa kepentingan mereka ke bidang hukum dan politik, salah satunya adalah politik representatif dan perjanjian internasional mengenai nilai hak asasi perempuan.

Pergerakan feminisme adalah bentuk dari perjuangan politik masyarakat akar rumput, kelompok marginal yang menjadi korban dari lingkungan sosial patriarki. Seiring berkembangnya waktu, pergerakan ini menjadi agenda politik untuk memasukkan nilai-nilai perempuan dalam pemerintahan. Mulai dari masalah hukum keluarga, pernikahan, kekerasan, hingga hak-hak sipil. Secara teoritis, politik feminisme berusaha mengungkap sisi feminis dari teori-teori politik baik klasik atau kontemporer. Seperti hak-hak sipil dimana secara teoritis kekuasaan politik diakui menjadi milik rakyat, namun perempuan masih terjebak dalam sektor domestik. Aspek penting dari pemikiran politik feminisme adalah pergerakan dan praktik politik, seperti melibatkan diri dalam pembuatan keputusan dan mobilisasi massa.

Adapun sifat dari pergerakan politik feminisme seperti diungkap Jovani, yaitu: *pertama*, adanya agenda tuntutan legislatif yang dilakukan melalui kampanye terorganisir seperti misalnya tuntutan atas peraturan perundang-undangan. *Kedua*, agenda tuntutan perubahan sosial yang bersifat non legislatif namun memiliki peran penting seperti menempatkan perempuan dalam jabatan lebih tinggi dan memperbanyak perempuan di parlemen. *Ketiga*, banyaknya organisasi keperempuanan sebagai kelompok penekan terhadap perubahan sosial informal, termasuk didalamnya adalah lembaga swadaya yang menyediakan ruang aman dan tempat perlindungan atas dasar solidaritas perempuan.

Keempat, adanya kolaborasi antara kelompok perempuan dan organisasi atau tempat lain sebagai wadah melakukan aktivitas.⁵¹

Feminisme politik pada akhirnya terbagi dalam dua wajah, yaitu politik distribusi dan politik pengakuan. Politik distribusi mengasumsikan perempuan sebagai suatu kelas yang menderita ketidakadilan akibat dari distribusi kekuatan yang salah, berkaitan dengan ekonomi politik untuk mengentaskan kesenjangan dan subordinasi. Sedangkan dalam politik pengakuan, ketidaksetaraan gender muncul akibat dari perbedaan status yang berakar dari tatanan struktur masyarakat (bukan ekonomi). Struktur masyarakat yang mendasari ketidakadilan gender ini adalah andosentrisme, yaitu pemahaman bahwa laki-laki adalah pusat dunia. Dengan begitu feminisme politik pengakuan mengkritik paham maskulinitas dalam masyarakat yang tidak memperhitungkan kepentingan perempuan. Politik pengakuan banyak membicarakan mengenai hukum dan kebijakan pemerintah yang cenderung andosentris layaknya marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan, hak-hak atas perlindungan dan pengakuan sebagai warga negara, hingga pengakuan untuk setara dalam bidang hukum.⁵²

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain berkenaan dengan topik yang diangkat peneliti. Adapun kajian tersebut telah meneliti menggunakan dasar teori serupa sehingga mampu memberikan acuan serta data pendukung. Peneliti memandang bahwa data dalam kajian terdahulu penting kehadirannya dalam penelitian ini adalah hasil kajian yang memiliki relevansi dengan topik bahasan.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Sukardi pada 2018 dengan judul *Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah)*. Penelitian yang dilakukan melalui kajian pustaka ini bermaksud untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pemikiran Gus Dur

⁵¹ Audra Jovani, "Politik Dan Kaum Feminis," *Sociae Polites*, 2011, 141–152, <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.467>, hlm.156.

⁵² Nancy Fraser, "Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice," *Studies in Social Justice* 1, no. 1 (2007), hlm.25.

terhadap kepemimpinan perempuan serta menganalisis pemikiran tersebut dalam konsep fiqh siyasah. Sumber data penelitian ini berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai pemikiran Gus Dur, terutama menyangkut kepemimpinan dan demokrasi. Teknik pengumpulan dan analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang kepemimpinan perempuan berpijak pada dasar teologis. Gus Dur tidak menyangkal kehadiran perempuan menjadi pemimpin negara.

Sedangkan dari perspektif fiqh siyasah, pandangan Gus Dur ini menurut Sukardi telah selaras, lantaran dalam Al Quran dan Hadis tidak pernah ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Sebaliknya, setiap umat harus berusaha sebaik mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdurrahman Wahid dalam menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 lebih condong pada artian bahwa laki-laki sebagai pemimpin atas keselamatan wanita dibandingkan laki-laki sebagai pemimpin negara. Melalui penafsirannya ini, Sukardi menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan perempuan sebagai pemimpin negara.⁵³

- 2) Penelitian yang dilakukan Erma Fatmawati pada 2019 berjudul *Perempuan, Abdurrahman Wahid, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam*. Fatmawati melakukan penelitian bertujuan untuk menjawab kepemimpinan perempuan dalam perspektif Abdurrahman Wahid. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Fatmawati mengungkapkan pemikiran Abdurrahman Wahid menganggap perempuan dan laki-laki memiliki peran publik yang sama. Dalam konteks demokrasi pun setiap warga negara dianggap sama. Oleh karena itu, Fatmawati menafsirkan pemikiran Gus Dur tidak membeda-bedakan jenis kelamin untuk memegang jabatan kepala sekolah. Dikatakan bahwa sekolah yang maju bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Fatmawati memberikan contoh satu sekolah di Jogja dengan kepala

⁵³ Sukardi, "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gu Dur) terhadap kepemimpinan perempuan: studi pemikiran emansipasi menurut Fiqh Siyasah Imamah."

seorang perempuan yang mampu menegakkan aturan sekolah dan memperbaiki sarana prasarana.⁵⁴

- 3) Penelitian oleh Faizatun Khasanah pada 2019 berjudul *Awareness On Islamic Feminism: Learning from Gus Dur and Husein Muhammad*. Penelitian oleh Khasanah merupakan studi komparatif yang membandingkan pemikiran feminisme Islam pada Gus Dur dan Husein Muhammad. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan untuk menyatakan perbedaan antara pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid dan Husein Muhammad. Berdasarkan penelitian, Khasanah menemukan bahwa Gus Dur menggunakan prinsip kemanusiaan dalam pemikirannya terhadap kesetaraan Gender. Khasanah mengungkapkan bahwa pemikiran Gus Dur cenderung ke bidang sosio kultural dengan penghormatan perempuan pada aktivitas sehari-hari dan dalam kekeluargaan.⁵⁵
- 4) Penelitian Nurhidayah pada 2013 berjudul *K.H. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia)*. Nurhidayah menitikberatkan penelitiannya untuk mengetahui sosok Gus Dur beserta pemikiran dan gerakannya terhadap teologi, budaya, dan politik. Penelitian ini diselenggarakan untuk menjawab pertanyaan mengenai pemikiran dan gerakan politik Gus Dur. Batasan penelitian dari segi pemikiran adalah pandangan Gus Dur tentang permasalahan demokrasi meliputi konsep Islam dan negara serta ideologi Pancasila. Sedangkan batasan pada peranan ditelusuri mulai saat Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU sampai presiden. Nurhidayah melakukan penelitiannya melalui studi pustaka dengan melibatkan empat prosedur, yaitu *heuristic*, kritik sumber, interpretasi, dan histiografi. Hasil penelitian menemukan akar dari pemikiran politik Gus Dur dilandasi oleh komitmennya pada kemanusiaan. Yaitu dengan mewujudkan toleransi dan kerukunan. Adapun pilar

⁵⁴ Erma Fatmawati, "Perempuan , Abdurrahman Wahid dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 2, no. 1 (2019): 1–22, <http://ejournal.pascasarjana-iainjember.id/index.php/IJIT/article/view/326>.

⁵⁵ Faizatun Khasanah, "AWARENESS ON ISLAMIC FEMINISM: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2019): 175–94, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1743>.

demokrasi berdasarkan Gus Dur yaitu kedaulatan hukum, penegakan HAM, pluralitas, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Peranan Gus Dur saat memimpin PBNU terlihat dari giatnya perlawanan terhadap orde baru dan Soeharto hingga membuat geram dengan terus mengkritik dan melawan bentuk pengekangan pada NU. Nurhidayah mengungkapkan semakin keras Soeharto mengekang Gus Dur, semakin keras pula Gus Dur melawan Soeharto. Peran yang ditunjukkan Gus Dur saat menjadi pemimpin NU adalah menegaskan kembali NU sebagai organisasi agama dan berpegang teguh pada Pancasila, mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat, dan menciptakan forum demokrasi. Peran politik Gus Dur turut tercermin dari aksinya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nurhidayah menjelaskan peranan Gus Dur dalam politik ketika menjabat menjadi presiden adalah pribumisasi dengan mengakui hak-hak etnis Tionghoa dan mendekonsentrasi TNI dan Polri.⁵⁶

- 5) Penelitian oleh Indo Santalia pada 2015 berjudul *K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisai, dan Pribumisasi*. Santalia mencoba menjabarkan sosok Gus Dur beserta ijtihadnya pada negara dan agama. Konsep yang ingin dikaji Santalia tepatnya mengenai agama, negara, pluralisme, demokrasi, dan pribumisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Santalia mengutip pemikiran Gus Dur tentang agama dan negara bahwasanya Islam tidak secara gamblang menentukan bentuk negara. Yang terpenting dalam pemikiran Gus Dur tentang negara adalah adanya permusyawaratan, keadilan, dan jaminan kebebasan. Yang mana negara juga menjamin kebebasan kaum perempuan dari penindasan. Dengan demikian pemikiran Gus Dur sejalan dengan Pancasila. Gagasan Pluralisme Gus Dur tampak melalui pembelaannya terhadap kaum minoritas dan sikap kolaborasi terbuka. Gagasan demokratisasi Gus Dur diungkapkan Santalia sebagai bentuk kecaman Gus Dur pada orde baru yang memandang demokrasi melalui lembaga saja. Gus Dur menyatakan bahwa demokrasi harus melalui sikap dan

⁵⁶ Nurhidayah, "K . H . Abdurrahman Wahid: Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia."

keadilan rakyat di mata hukum. Terkait pribumisasi, Santalia menunjukkan sikap Gus Dur yang tidak menghendaki penyelesaian permasalahan negara dengan menjadikan Islam sebagai alternatif. Melainkan, Islam diserap dalam nilai-nilai lokalitas dan kultur sosial.⁵⁷

- 6) Penelitian oleh Maulida pada 2018 dengan judul *Konsep Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid*. Penelitian Maulida merupakan studi tokoh dengan metode penelitian studi pustaka. Penelitian ini mencoba mencari tahu mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia kemudian dikaitkan dengan HAM menurut konsep Islam. Sumber yang digunakan oleh Maulida berasal dari buku karangan Gus Dur dan tokoh lain yang membicarakan Gus Dur. Secara umum penelitian ini juga ingin menelusuri munculnya pemikiran HAM.

Maulida mengungkapkan pemikiran Gus Dur berasal dari dunia pesantren. Pemikiran Gus Dur merupakan sintesis Islam tradisional yang didapat Gus Dur dari pesantren dan dunia barat. Pemikiran paling dominan adalah humanitarisme. Gus Dur menjabarkan Hak Asasi Manusia sebagai pemenuhan terhadap lima jaminan dasar Islam yaitu keselamatan fisik, keselamatan berkeyakinan, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda, dan keselamatan hak milik. Aktualisasi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam hemat Fatmawati terletak pada pembelaan terhadap kaum minoritas sehingga dapat dikatakan Gus Dur menyuarakan Hak Asasi wong cilik.

Spektrum pemikiran Gus Dur dikatakan Maulida memiliki perluasan dalam kurun 1970-2000. Dimana pada tahun 1990-an wacana yang dibicarakan Gus Dur salah satunya adalah gender.

Dari enam literatur di atas, maka kebanyakan penelitian mengkaji melalui perpektif Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Salah satu literatur yang membahas studi komparasi pemikiran feminisme Gus Dur dengan Husein Muhammad hanya mengungkapkan sedikit mengenai feminisme Gus Dur dalam

⁵⁷ Indo Santalia, "K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi," *Al-Adyaan* 1, no. 2 (2015): 137–46.

kehidupan sosial. Penelitian ini memiliki segi kebaruan dengan mengangkat tema pemikiran feminisme Gus Dur terhadap keberadaan politik perempuan. Peneliti berusaha mengidentifikasi pemikiran feminisme Gus Dur, khususnya keberpihakan Gus Dur pada perempuan di konteks ke-Indonesia-an. Lebih lanjut, peneliti ingin mengetahui implikasi yang dibawa dari pemikiran Gus Dur terhadap peran politik perempuan di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasari oleh adanya dua teori besar, yaitu universalisme Islam dan feminisme. Kedua teori di atas adalah titik berangkat pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid. Penelitian ini melihat pemahaman Gus Dur bercorakkan feminisme Islam dan feminisme liberal. Ini ditunjukkan melalui karya-karya tulisan Gus Dur serta kebijakan yang dikeluarkan di masa kepemimpinannya dalam PBNU dan sebagai presiden ke-4. Pemikiran feminisme Gus Dur berakar pada feminisme Islam dengan mendasarkan semua tafsiran pada ajaran Islam. Sedangkan keberpihakannya tampak melalui feminisme liberal yang mengedepankan isu kepemimpinan politik perempuan. Kerangka berpikir dari penelitian ini seperti tampak pada tabel di bawah:

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

